

**SURVEI PRAKTEK AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN
KEJURUAN DAN TEKNOLOGI (VTET)
DI NEGARA ANGGOTA ASEAN**

Oleh:

Sukardi

Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

Survey practice of VTET accreditation in SEAMEO member Countries had three major objectives. These objectives were: 1) to provide information in connection with VTET institution accreditation; 2) to facilitate information base for developing other relevant research; 3) to enhance the Center's program in conducting applied research in VTET areas. The study used survey approach in which all related data were gathered with research question as guide of study. The questionnaire was developed by the center and formal documentation was used to gather a needed information. Before contributed to the respondents, the questionnaire was validated by using content validity. From the study survey practice of VTET Accreditation had five findings relate to institutional accreditation. These findings included: firstly, the names of national accreditation body (NAB) were various from country to country. There were two types of structural NAB organization. The national accreditation body consisted government officer only, and the national accreditation body that consisted of government officers, private persons, and community leaders. Secondly, the national accreditation bodies that very important position especially in maintaining the quality of VIET institutions. Thirdly, VTET institutions in several countries already received evaluation whereas. Their national accreditation bodies did not evaluate the others in some countries. Fourthly the accreditation in the VTET institutions generally were very benefit especially for getting: community support, acceptance in professional organization, receiving federal funds, acquiring non government organization (NGO) funds and getting more students. Fifthly the benefits of accreditation for the institution could be improved by: prioritizing standard competency of graduates, teachers, facility all (3 industrial linkages; following accreditation program guide lines; enhancing linkage between vocational schools and industry; including new policy regarding implementation of accreditation; and improving the NAB staff from industry.

Key words: SEAMEO member countries, institutional accreditation, NAB, VTET.

Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan dinamis, tempat bangsa-bangsa di kawasan tersebut secara kontintyu bergerak menuju peradaban yang lebih modern. Gerakan bangsa-bangsa ASEAN pada prinsipnya akan mempengaruhi isu global yang ada, hal ini sesuai dengan pernyataan John Naisbitt (1996) yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Asia termasuk Asia Tenggara juga menjadi fenomena penting perkembangan dunia sekarang. Organi-sasi para Menteri Pendidikan se Asia Tenggara (SEAMEO) sekarang memiliki 14 pusat regional dengan cakupan layanan yang berbeda-beda. Program intensif yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disediakan organisasi regional para menteri-menteri pendidikan ASEAN mencakup kawasan luas, dengan jumlah sekitar 446,9 juta penduduk akan dapat mempengaruhi isu perdagangan dan bisnis di dunia mendatang (Abdulgani, 1997).

Pusat regional pendidikan dan pelatihan di bidang kejuruan dan teknologi (VTET) adalah salah satu dari empat belas pusat regional yang didirikan oleh para menteri pendidikan ASEAN dengan layanan yang berbeda-beda. Pusat ini sangat peduli terhadap arti pentingnya Sumber Daya Manusia khususnya bidang pendidikan kejuruan dan teknologi di Abad XXI. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi keperluan negara-negara ASEAN, hal tersebut memerlukan perencanaan yang intensif dengan peningkatan implementasi yang mampu mengakomodasi persyaratan spesifik. Telah menjadi komitmen pusat regional VOCTECH, dan negara-negara anggota agar selalu dapat mendirikan, mengembangkan, dan memelihara lembaga pendidikan dan pelatihan bidang kejuruan dan teknologi yang ada agar tetap

bekerja secara efektif, sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh setiap anggota.

Berdasarkan kesiapan lembaga pendidikan dan pelatihan VTET, pusat regional Brunei Darussalam melakukan studi secara intensif untuk mendapatkan informasi tentang praktek akreditasi lembaga. Satu pendekatan guna mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan penelitian dengan topik: Survei Praktek Akreditasi Lembaga Pendidikan VTET di Negara-negara Anggota ASEAN.

Akreditasi adalah pengenalan secara formal kualitas suatu institusi pendidikan. Akreditasi pada dasarnya merupakan proses dimana lembaga pelatihan dan pendidikan dievaluasi oleh suatu badan yang berkompeten. Akreditasi semula diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan universitas bersama dengan badan akreditasi berdasarkan asas sukarela. Dari proses evaluasi oleh badan akreditasi yang ada, nilai akreditasi diberikan pada lembaga tersebut. Evaluasi akreditasi lembaga atau institusi menurut Megginson, dkk. (1993) menekankan pada empat karakteristik: (1) mendorong pengenalan pengalaman belajar yang telah lalu; (2) menekankan kompetensi yang diperlukan; (3) mendasarkan data-data belajar yang dipresentasikan dari sudut pandang implementasi yang komprehensif, dan (4) mendorong pengenalan kemampuan secara luas.

Akreditasi pada umumnya bermanfaat bagi para manajer, komite penasehat dan pemegang kebijakan lembaga VTET. Manfaat tersebut termasuk akreditasi sebagai alat untuk: (1) meningkatkan kredibilitas baku institusi; (2) menambah masukan institusi VTET; (3) meningkatkan status lembaga VTET yang bersangkutan; (4) mempengaruhi keluaran lembaga; (5) memotivasi masyarakat untuk lebih mengenal potensi lembaga; (6) mendorong sekolah berkembang dan menyelenggarakan program yang memenuhi

kebutuhan tenaga kerja serta ekonomi bangsa, dan (7) merefleksikan perkembangan profil lembaga VTET.

Implementasi akreditasi lembaga pendidikan maupun pelatihan di bidang VTET di lapangan pada prinsipnya masih jauh dari harapan. Proses akreditasi lembaga di bidang VTET kenyataannya masih menghadapi variasi permasalahan, di antaranya:

- Akreditasi dipandang sebagai alat kontrol daripada sebagai sarana pemberi bantuan
- Akreditasi masih dilihat sebagai tanggung jawab lembaga, dan diimplementasikan menurut misi dan tujuan lembaga. Oleh karena itu, masih ada anggapan bahwa pelaksanaannya tidak memerlukan evaluasi dari badan akreditasi yang terpisah dari lembaga tersebut.
- Objektivitas lembaga akreditasi seringkali masih diragukan oleh administrator atau penyelenggara pendidikan.
- Sekolah menawarkan program tergantung pada kebutuhan masyarakat,
- Akreditasi baku sebaiknya bervariasi dan dapat mengakomodasi dari bermacam-macam program yang ditawarkan.
- Implementasi akreditasi memerlukan waktu, energi, dan biaya
- Manfaatnya dirasa terlalu kecil, jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan
- Kriteria akreditasi tidak dikomunikasikan ke pimpinan sekolah secara transparan.

Studi praktek akreditasi lembaga-lembaga pendidikan kejuruan dan teknologi (VTET) dilandasi dengan pertanyaan penelitian seperti berikut:

1. Bagaimanakah pendapat para manajer, administrator dan guru senior terhadap praktek akreditasi di lembaga VTET?

2. Seberapa sering evaluasi akreditasi dikerjakan oleh badan akreditasi?
3. Apakah manfaat akreditasi bagi lembaga VTET?
4. Bagaimana meningkatkan manfaat pelaksanaan akreditasi bagi lembaga, negara, dan pusat Regional VOCTECH?

Studi praktek akreditasi di lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang kejuruan dan teknologi mempunyai tiga tujuan utama:

1. Melengkapi informasi khusus tentang akreditasi institusi bidang kejuruan dan teknologi di wilayah negara anggota ASEAN.
2. Menyediakan informasi dasar untuk mengembalikan penelitian sejenis yang relevan bagi lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan.
3. Meningkatkan aktivitas pusat regional VOCTECH dalam penyelenggaraan penelitian terapan di bidang pendidikan kejuruan dan teknologi.

Perkembangan akreditasi institusi diawali oleh Asosiasi Medis di negara Amerika Serikat pada tahun 1905 seiring dengan proses sertifikasi untuk praktek-praktek profesi (Orlans: 1978). Akreditasi profesi terjadi pada institusi pendidikan, karena beberapa alasan. Pertama, masyarakat memerlukan semacam standar kualitas pendidikan, dan justifikasi biaya untuk menghasilkan sertifikasi profesi seperti ahli hukum, dokter, arsitek, dan sebagainya. Kedua, akreditasi terjadi sebagai akibat munculnya isu kemasyarakatan yang menghubungkan adanya status profesi dengan perubahan status secara vertikal seseorang. Perubahan status seseorang menjadi lebih baik dalam masyarakat pada umumnya diikuti dengan penghasilan orang tersebut menjadi lebih baik. Alasan lain yang juga berkaitan dengan timbulnya akreditasi profesi adalah kenyataan adanya kontrol yang *overlapping* antara praktisi profesi dengan lembaga sekolah yang menghasilkan mereka.

Pada era globalisasi, perdagangan, bisnis, serta industri berhubungan bersama dengan institusi pendidikan kejuruan dan pelatihan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, masalah seputar akreditasi menjadi lebih penting. Terakreditasinya lembaga merupakan suatu bentuk komitmen bukan hanya menjadi tanggung jawab para staf tertentu saja, tetapi secara komprehensif telah menjadi instrumen manajemen guna mengorganisasi dan mengimplementasikan kebijakan kualitas (Wilton: 1994).

Komisi Nasional Akreditasi (KAN) dibentuk dalam usahanya mencapai kontrol lembaga yang bersangkutan, mendisiplinkan, menyederhanakan dan meraasionalkan prosés akreditasi yang andal. Ada dua macam pendekatan untuk membentuk komisi Akreditasi Nasional. Pertama, komisi akreditasi yang didirikan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan sebagai penanggung jawab, dan yang kedua adalah komisi akreditasi nasional yang dibentuk oleh lembaga atau agensi swasta. Cara pertama, dikatakan sistem Eropa, dengan karakteristik persyaratan ketat dalam proses akreditasi. Semua lembaga pendidikan yang berkepentingan, menurut pendekatan Eropa ini, harus diakreditasi oleh KAN jika mereka ingin menyelenggarakan program-programnya. Sekolah-sekolah yang lulus akreditasi saja yang dapat menyelenggarakan program pendidikan. Sementara sekolah yang belum lulus harus memperoleh bimbingan untuk meningkatkan layanan kualitas. Model kedua disebut sistem Amerika. Pada model ini, lembaga akreditasi nasional pada umumnya dibentuk oleh lembaga swasta atau organisasi independen yang memperhatikan kualitas layanan masyarakat. Menurut model ini, masyarakat disamping mempunyai fungsi sosial juga mempunyai hubungan fungsional yang erat kaitannya dengan lembaga pendidikan. Mereka mempunyai fungsi ganda. Masyarakat merupakan grup penduduk dimana para siswa

industri
an dan
berku-
erakre-
hanya
secara
gorga-
994).
hanya
linkan,
andal.
editasi
rintah
dan
oleh
ropa,
itasi.
pede-
ngin
yang
gram
oleh
dua
tasi
atau
nan
yai
rat
gsi
wa

lembaga VTET berasal, dan pada sisi lain, mereka juga sebagai kelompok penduduk yang akan menerima para lulusan dari lembaga pendidikan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif.

Kedua model mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam implementasi akreditasi. Sistem Amerika disamping tetap memiliki fungsi standarisasi juga memberikan variasi lebih pada instansi yang berkepentingan. Akibatnya akreditasi model Amerika dapat berkembang dengan lebih kondusif di masyarakat dan dapat diterima oleh sekolah dan institusi pelatihan. Mereka pada umumnya secara sukarela mengharapkan agar dapat diakreditasi oleh badan akreditasi yang berwenang.

Akreditasi institusi pendidikan VTET pada umumnya meliputi variasi tingkat institusi pendidikan seperti: tingkat menengah, *post sekondar* dan program *non-degree*. Survei ini menekankan pada lembaga pendidikan dan pelatihan bidang keju-ruan dan teknologi pada tingkatan di atas.

Dalam hubungannya dengan *cakupan* akreditasi lembaga, ada tiga *cakupan* utama yang dipertimbangkan oleh badan akreditasi nasional. Ketiga *cakupan* tersebut ialah: 1) layanan yang diberikan oleh lembaga terhadap masyarakat, 2) efisiensi organisasi dalam memberikan layanan, dan 3) relevansi program yang diberikan oleh lembaga. *Northwest Association of Schools and Colleges* (1980) memberikan informasi lebih rinci tentang komponen penting yang dievaluasi oleh badan akreditasi. Komponen tersebut termasuk: a) tujuan institusi, b) kondisi fisik dan fasilitas, c) administrasi keuangan, d) perpustakaan e) program pendidikan f) staf pengajar g) administrasi h) layanan siswa, i) kegiatan ekstra kurikular. Komponen yang ada di lembaga tersebut kemudian dievaluasi

berdasarkan instrumen akreditasi baku yang dimiliki oleh badan akreditasi nasional.

Cara Penelitian

Proses penelitian tentang praktek akreditasi lembaga menggunakan teknik survei, yaitu penelitian secara *cross sectional* dengan mengumpulkan data pada saat yang telah ditentukan (Bailey:1987). Survei tentang akreditasi lembaga di bidang kejuruan dan teknologi menggunakan populasi para delegasi wakil-wakil negara anggota ASEAN sebagai total grup yang diteliti. Mereka adalah orang-orang yang telah terlibat secara aktif dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat regional VOCTECH di Brunei Darussalam. Variasi kegiatan tersebut termasuk program pelatihan dan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau delegasi dari sembilan negara anggota. Posisi mereka bervariasi termasuk: administrator, guru atau instruktur senior maupun nara sumber. Sampel penelitian adalah semua orang atau *representative persons* yang terpilih menggunakan metoda *purposive sampling*.

Dua alat pengumpul data digunakan sebagai instrumen penelitian. Kedua alat tersebut yaitu kuesioner dan dokumentasi resmi yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN yang sesuai dengan konteks yang diteliti. Kuesioner sebelum digunakan divalidasi terlebih dahulu menggunakan validasi isi dengan menekankan pada *face validity* dan *substantive validity* dengan tujuan agar item pertanyaan dapat mengukur variabel yang hendak diukur. Kuesioner yang telah divalidasi kemudian didistribusikan kepada responden, hasil jawaban kemudian dikumpulkan kembali dan dianalisis sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Hasil Penelitian

Penelitian survei akreditasi lembaga di bidang pendidikan kejuruan dan teknologi (VTET) akhirnya memperoleh hasil temuan seperti berikut:

1. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai pemerintah yang mempunyai posisi bervariasi termasuk kepala sekolah, supervisor, ketua jurusan, peneliti, guru, dan instruktur senior dari lembaga pendidikan dan pelatihan bidang kejuruan dan teknologi.
2. Nama-nama badan akreditasi nasional yang berkait erat dengan penilaian kualitas VTET berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Di negara Brunei Darussalam: *Brunei Darussalam Technical and Vocational Education Council (BDTVEC)*; Negara Cambodia: *Accreditation Committee for Cambodia*; Indonesia: Badan Akreditasi Nasional (BAN); Laos PDR: *Departement of Vocational and Technical Education and Pelatihan for Laos People's*; Malaysia: *Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan*; Philippines: *Technical Vocational Education Accreditation Programs (TVEAP)*; Singapura: *Singapore Accreditation Committee*; Thailand: *The Education Council for Thailand*; dan Vietnam: *National Institute for Education Development (MOET)*. Di negara-negara anggota ASEAN, ada dua bentuk struktur organisasi badan akreditasi nasional. Badan akreditasi dengan anggota terdiri dari pegawai pemerintah atau kementerian pendidikan, dan badan akreditasi dengan anggota yang berasal dari: pegawai pemerintah, tokoh swasta dan pimpinan masyarakat.
3. Kebanyakan responden setuju bahwa peranan badan akreditasi nasional adalah sangat penting khususnya dalam menjaga kualitas layanan lembaga VTET baik negeri maupun swasta

4. Lembaga VTET di beberapa negara anggota ASEAN telah dievaluasi oleh badan akreditasi. Di samping ada juga lembaga VTET di beberapa negara seperti di Laos PDR, Thailand, dan Vietnam tidak dievaluasi oleh badan akreditasi, tetapi oleh departemen pendidikan mereka Untuk mendapatkan penilaian dari badan akreditasi pada umumnya lembaga harus mengajukan proposal sedikitnya dua kali sebelum proses akreditasi dilaksanakan.
5. Akreditasi lembaga pada umumnya sangat bermanfaat bagi lembaga yang bersangkutan. Manfaat tersebut termasuk:
 - a. guna memperoleh dukungan dari masyarakat
 - b. agar dapat diterima dalam organisasi profesi
 - c. memperoleh dana dari pemerintah
 - d. memperoleh dana dari lembaga/organisasi swasta
 - e. mendapatkan siswa lebih banyak.
6. Ada beberapa masukan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja badan akreditasi nasional. Masukan penting tersebut termasuk:
 - a. kompetensi baku para lulusan, guru, fasilitas dan hubungan industri perlu diprioritaskan
 - b. masukan lembaga harus mengikuti petunjuk/arahan program akreditasi
 - c. hubungan antara sekolah dan industri dimasukkan sebagai cakupan komponen penilaian
 - d. hasil akreditasi diusahakan mengarah untuk dapat berlaku di negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara persemakmuran (*commonwealth*)

- e. implementasi profesi yang berkaitan dengan badan akreditasi dan sertifikasi nasional sebaiknya diprioritaskan untuk diteliti pada agenda pusat regional berikutnya,
- f. perlu adanya anggota-anggota badan akreditasi nasional dari tokoh-tokoh industri.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghani bin Haji Omar. (1997). *SEAMEO VOCTECH: Onwards to the next milleium*. Brunei Darussalam: SEAMEO VOCTECH.
- Bailey, K D. (1987). *Methods of social research* (3rd Edition). New York : The Free Press.
- Burgess, R B (1989). *Sampling strategies in field research: A source-book and field manual*. London: Unwinhyman.
- Ferguson, G A. and Takane, Y. (1989) *Statistical Analysis in Psychology and Education*. (6th Edition). New York:
- Gay. L.R. (1980). *Educational evaluation and measurement. competencies for analysis and application*. Ohio: Charles E Merill Publishing Company.
- Fransisco, F.Y (1988). *Trends and issues in technical and vocational education*. Philippines: Metro Manila
- Megginson, D., Mattew, J J and Bonfield, P (1993). *Human resource development*. London: Kogan Page Limited.
- Milagros, D. Ibe. (1997). *Development of instruments for gathering evaluation data*. Unpublished Paper, Thailand: SEAMEO.

- IQH, Yunizar D, and Joko S (1997) Educational accreditation. *Gatra*. 7 Juni pp.125.
- Naisbitt, J. (1996). *Megatrends Asia: The eight Asian megatrends that are changing the world*. London: Nicolas Brealy Publishillg Limited UK.
- Orlans, H. (1975). *Private accreditation and public eligibility*. Massachusetts, DC, Health and Company.
- Tibor, T. and Feldman, I. (1996). *ISO 14000 A guide to the new environmental management standard*. Chicago: IRWIN Professional Publishing.
- Wilton, P S. (1994). *The quality system development handbook with ISO 9002*. New York: Prentice Hall.
- (1980). *Accreditation Handbook*. Washington: Northwest Association of Schools and Colleges.
- (1997) *National skill certification in Malaysia: The accreditation approach*. Malaysia: published by National Vocational Training Council (NVTC). Ministry of Human Resources.
- (1997). *A report on survey study programs and diplomas, degrees and other certificates granted by higher education institutions in Asia and the Pacific*. Bangkok: Compiled by SEAMEO RIHED and UNESCO PROAP.
- (1997). *NSW Vocational education and training accreditation board. Published through Internet*. Sydney: VTEAB publication.